

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

#### 2.1 Sejarah Perusahaan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yaitu salah satu Kementerian Desa dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembangunan pedesaan dan pada Kawasan perdesaan, pemberdayaan terhadap manusia serta masyarakat desa setempat, percepatan dealam pembangunan di daerah desa tertinggal, dan transmigrasi. Kementerian Desa, Pembanguana daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berada di bawah wewenang Presiden. Kementerian Desa, ini dipimpin oleh seorang Menteri Desa, Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal sejak awal 27 Oktober 2014 dan sekarang dijabat oleh Bapak Marwan Ja'far. Pada akhir 2016, kepemimpinan di alihkan kepada Eko Putro Sandjojo.



Gambar 2.1 Gedung Kementerian Desa  
Sumber: Kemendesa.go.id

Sesuai Keputusan Presiden, Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun Tahun 2019, Pembangunan Desa Provinsi, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Penetapan Persetujuan Menteri Negara dan Kementerian Negara Maju Kabinet Indonesia periode 2019-2024. Migrasi dipimpin oleh Abdul Halim Iskandar.

### **Tiga Fase Kementerian Desa**

**Fase 1:** Pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri baru saja membentuk Kabinet Gotong royong, Kementerian Pembinaan Pembangunan di kawasan timur Indonesia.

**Fase 2:** Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kementerian tersebut berubah nama menjadi Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.

**Fase 3:** Kementerian berubah nama menjadi kementerian pembangunan dan reinkarnasi desa yang tidak menguntungkan ketika Presiden Joko Widodo menjabat. Singkatan yang sering digunakan adalah KPDPDTT atau Kemendesa. Nama dari desa, Kementerian Pembangunan Daerah Miskin dan Reinkarnasi adalah nomenklatur resmi setelah kementerian ini.

#### **2.1.1 VISI**

*“Terwujudnya Indonesia yang Berkedaulatan, Mandiri dan Berkepribadian yang Berlandaskan Gotong Royong”.*

#### **2.1.2 MISI**

Agar mencapai misi tersebut, maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai misi yang meliputi (6) enam kegiatan, diantaranya:

1. Terwujudnya kedaulatan dan keamanan nasional yang dapat menjaga dan mendukung kemandirian ekonomi serta mencerminkan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan dan kekayaan lautnya.
2. Mewujudkan masyarakat yang maju, demokratis, dan seimbang berdasarkan keunggulan peraturan perundang-undangan yang ada.

3. Melaksanakan politik luar negeri yang aktif dan liberal serta memperkuat identitas negara maritime.
4. Mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju dan sejatera.
5. Menyadari bahwa Indonesia adalah Negara maritime berlandaskan kemandirian, maju, dan kuat yang didirikan atas dasar kepentingan nasional.
6. Realitas sosial memiliki kepribadian dalam budaya.

### 2.1.3 NILAI

Menurut Noerirawan (2012), nilai suatu perusahaan adalah suatu kondisi yang dicapai untuk menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah beberapa tahun beraktivitas sejak perusahaan didirikan. Definisi lain dari nilai adalah norma moral dan etika yang mendefinisikan apa yang harus dilakukan perusahaan dan mendukung perwujudan visi perusahaan. Berikut nilai-nilai dari Desa, Pembangunan Daerah Miskin dan Keimigrasian (KDPDTT):

Nilai Budaya Kerja pada Karyawan terdiri atas:

1. Akuntabilitas  
kondisi di mana seseorang individu bertanggung jawab atas Keputusan apa yang telah dibuat atau Tindakan yang di buat berdasarkan keputusan tersebut dipahami sesuai dengan aturan.
2. Pakar  
Sikap dan keterampilan yang dimiliki seluruh pegawai sebagai suatu profesi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya guna mencapai arah dan tujuan organisasi sesuai dengan kemampuan yang ada dan mencapai kinerja yang baik.
3. Kejujuran  
Karakter seseorang yang ucapan dan tindakannya selaras, selalu konsisten dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip, nilai, norma sosial dan organisasi.

#### 4. Rasa Persatuan

Rasa keakraban dengan karyawan baik fisik maupun emosional yang dihasilkan dari interaksi sosial yang berkualitas di tempat kerja. Ini membawa perasaan yang sama untuk melakukan yang terbaik bagi organisasi.

#### 2.1.4 Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada individu atau kelompok untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi bidang tersebut. Penghargaan biasanya diberikan dalam bentuk piala, medali, sertifikat, gelar, plakat, atau pita.

Berikut ini adalah wujud pencapaian suatu penghargaan yang di dapat oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal:

1. Pada tahun 2019, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi mendapatkan penghargaan pada kategori kementerian, sebagai badan publik Informatif. Dalam Undang-Undang 14 Tahun 2006 tentang keterbukaan informasi public.



Gambar 2.2 piagam penghargaan sebagai badan publik informatif

Sumber: Kementerian Desa

2. Pada tahun 2018, pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi. Menerima penghargaan dari OMBUSMAN Republik Indonesia dalam kategori “Predikat Kepatuhan Tinggi 2018” untuk standar pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.



Gambar 2.3 Piagam Predikat Kepatuhan Tinggi 2018

Sumber: Kementerian Desa

### 2.1.5 Logo Perusahaan



Gambar 2.4 Logo Kementerian Desa

Sumber: internet (2021)

## 2.2 Struktur Organisasi

Menurut Robbins dan Coulter (2007) struktur organisasi adalah kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka tersebut tugas-tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan. Adapun susunan struktur organisasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDPTT).



Gambar 2.5 Struktur Kementrian Desa

Sumber : Kementrian Desa (2021)

1. Sekretariat Jendral.
2. Direktorat Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan.
3. Direktorat Jendral Pembangunan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
4. Direktorat Jendral Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

5. Direktorat Jendral Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
6. Inspektorat Jendral.
7. Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
8. Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Desa, Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi.

### **2.3 Kegiatan Umum Perusahaan**

Badan informasi umum dan Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi yang bertanggung jawab untuk melakukan pengembangan, dan Penelitian, pelatihan dan Pendidikan, pengeinformasian di bidang desa serta pengelolaan data, pembangunan dan migrasi daerah tertinggal.

1. Pembangunan, pendidikan, pelatihan, program penelitian dan anggaran, pengelolaan data dan informasi di bidang desa, penyempurnaan kebijakan teknis pembangunan dan migrasi daerah tertinggal. dan migrasi daerah tertinggal.
2. Informasi di bidang pelaksanaan dan penelitian, pendidikan dan pelatihan, dan desa dan pengelolaan data, pengembangan dan migrasi daerah tertinggal.
3. Pelaksanaan dan pemantauan di wilayah desa pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan dan migrasi daerah tertinggal, serta pengelolaan data dan informasi.
4. Lembaga penelitian dan pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pengelolaan informasi.
5. Melakukan beberapa fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.